



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Wijayanti, S.H.; M.H.  
Jabatan : Kepala Biro Persidangan I

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suprihartini, S.IP., M.Si  
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

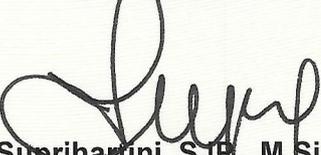
Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

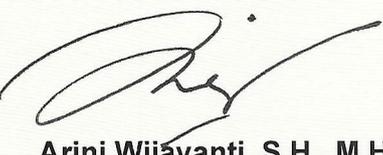
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

  
**Suprihartini, S.IP., M.Si**  
NIP. 19710106 199003 2 001

  
**Arini Wijayanti, S.H., M.H.**  
NIP. 19710518 199803 2 010



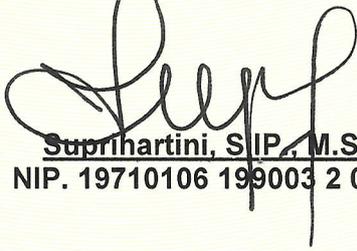
## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

| No. | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target   |
|-----|---|---|--|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)  |
| 1.  | Rasionalisasi Penetapan Program Legislasi nasional (Prolegnas) yang aspiratif                                   | 1. Jumlah Penyusunan dan Pembahasan RUU Usul DPR  | 11 RUU   |
|     |   | 2. Jumlah Pembahasan RUU Usul Pemerintah  | 11 RUU   |
|     |   | 3. Jumlah Pembahasan RUU Kumulatif Terbuka  | 14 RUU   |
| 2.  | Tersedianya APBN bagi penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola                           | 1. Jumlah rekomendasi kebijakan anggaran mitra kerja DPR RI   | 44 rekomendasi                                 |
| 3.  | Terselenggaranya Fungsi Pengawasan DPR terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah yang berkualitas | 1. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil pengawasan  | 12 rekomendasi                                 |
| 4.  | Terlaksananya pengisian jabatan publik  | 1. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil pengawasan  | 5 rekomendasi                                  |
| 5.  | Meningkatnya Kualitas Dukungan Persidangan dan Risalah  | 1. Persentase Skenario dan Laporan Singkat Persidangan Komisi I sampai dengan Komisi XI yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia   | 100%   |
|     |   | 2. Persentase Skenario dan Risalah Rapat Persidangan Paripurna yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  | 100%   |
|     |   | 3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Biro Persidangan I   | 3,40   |
|     |   | 4. Nilai IKPA Mini Biro Persidangan I <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi DIPA</li> <li>- Deviasi Halaman III DIPA</li> <li>- Penyerapan Anggaran</li> <li>- Belanja Kontraktual</li> <li>- Capaian Output</li> </ul> | 96<br>9,60<br>19,20<br>24,00<br>14,40<br>28,80 |
|     |   | 5. Persentase Realisasi Anggaran  | 98%  |



| Program                           | Anggaran             |
|-----------------------------------|----------------------|
| Satker Dewan                      | Rp317.941.533.000,00 |
| Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI | Rp317.941.533.000,00 |
| Satker Setjen                     | Rp7.002.929.000,00   |
| Program Dukungan Manajemen        | Rp7.002.929.000,00   |

Deputi Bidang Persidangan,



**Suprihartini, S.IP., M.Si**  
NIP. 19710106 199003 2 001

Jakarta, 8 Januari 2025  
Kepala Biro Persidangan I,



**Arini Wijayanti, S.H., M.H.**  
NIP. 19710518 199803 2 010

